

Reponsivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanganan Bencana Tanggap Darurat Angin Kencang Di Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur

Muhammad Ardyansyah Hardianto
NPP. 31. 0555

*Asdaf Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur
Program Studi Manajemen Keamanan Dan Keselamatan Publik*

Email: ardisamba2@gmail.com

ABSTRACT

Problem (GAP): Such disasters happen very quickly, requiring a high level of responsiveness from BPBD to immediately address the situation when strong winds occur. However, the response is still not optimal, resulting in the increasing impact of strong wind disasters each year. This is due to the underutilization of available resources to maximize disaster management. **Objective:** To describe the responsiveness of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) in addressing the impacts of a windstorm disaster that occurred in Bondowoso Regency. **Method:** This research uses a qualitative approach. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation. **Results/Findings:** This research shows that the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Bondowoso Regency has demonstrated a high level of responsiveness in responding to reports of windstorm disasters received. **Conclusion:** The BPBD of Bondowoso Regency is assessed to have been able to respond quickly and effectively to every incoming report, thereby minimizing the impact of the windstorm disaster. This reflects the readiness and reliability of BPBD in handling emergency situations and providing optimal service to the community.

Keywords: Responsiveness, Windstorm, Disaster, Mitigation

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Bencana angin kencang terjadi begitu cepat sehingga membutuhkan responsivitas yang tinggi dari BPBD untuk segera melakukan penanganan saat bencana angin kencang terjadi. Namun, penanganannya masih belum maksimal sehingga dampak dari bencana angin kencang tersebut masih meningkat setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemanfaatan sumber daya yang ada untuk memaksimalkan penanganan bencana angin kencang. **Tujuan:** Untuk mendeskripsikan responsivitas BPBD dalam menanggulangi dampak bencana angin kencang yang terjadi di Kabupaten Bondowoso. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bondowoso telah menunjukkan tingkat responsivitas yang tinggi dalam menanggapi laporan-laporan bencana angin kencang yang diterima. **Kesimpulan:** BPBD Kabupaten Bondowoso dinilai telah mampu merespon secara cepat dan efektif terhadap setiap laporan yang masuk, sehingga dapat meminimalisir dampak dari bencana angin kencang tersebut. Hal ini mencerminkan kesiapan dan kehandalan BPBD dalam menangani situasi darurat serta memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Kata Kunci: Responsivitas, Angin Kencang, Bencana, Penanggulangan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bencana secara garis besar merupakan suatu kejadian yang disebabkan oleh faktor alam maupun non-alam yang berpotensi untuk mengganggu kehidupan sosial dan aktivitas masyarakat. Bencana menyebabkan banyak aktivitas menjadi tidak berjalan semestinya dan juga berdampak pada kerugian finansial atau bahkan hilangnya banyak nyawa manusia. Pengertian di atas termuat dalam definisi bencana dalam Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-Undang ini mengatur aspek penting dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang merupakan kewenangan serta tanggung jawab dari pemerintah yang harus dilaksanakan dengan terencana, terkoordinasi, dan terpadu secara menyeluruh. Dilihat dari segi geografis, Bangsa Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman etnik yang berbeda-beda sehingga membuatnya sangat unik. Kekayaan sumber daya yang dimiliki Indonesia pun tak kalah banyaknya dengan keanekaragaman etnik yang dimiliki. Namun, di samping keanekaragaman etnik dan sumber daya alam yang melimpah ini, Indonesia juga memiliki intensitas bencana alam yang tinggi.

Tingginya intensitas bencana alam yang terjadi tak lepas dari fakta bahwa Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik, yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik. Hal ini menjadi salah satu faktor Indonesia menjadi daerah yang rawan terkena bencana alam. Indonesia juga terletak tepat pada zona garis khatulistiwa sehingga menyebabkan Indonesia beriklim tropis yang hanya memiliki musim kemarau dan musim hujan. Musim yang ada di Indonesia dipengaruhi oleh angin muson, yaitu angin muson timur dan angin muson barat. Angin muson barat yang berhembus dari Benua Asia ke Australia melewati perairan Laut China Selatan dan Samudera Hindia dengan membawa intensitas air yang sangat melimpah sehingga bergerak melewati Indonesia dengan membawa curah hujan yang tinggi dan mengakibatkan Indonesia mengalami musim hujan, yang mana umumnya ini terjadi pada bulan Desember hingga Februari.

Pada bulan-bulan tersebut, curah hujan bisa sangat tinggi dan mengakibatkan bencana-bencana hidrometeorologi, termasuk banjir, longsor, dan angin kencang. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tercatat ada 988 bencana alam yang terjadi pada kurun waktu 1 Januari – 9 Mei 2023. Bencana tersebut mencakup gempa bumi, erupsi gunung api, kebakaran hutan lahan (karhutla), kekeringan, banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, dan gelombang pasang/abrasi. Daerah konvergensi ialah suatu daerah yang memiliki suhu tertinggi dibanding dengan daerah sekitarnya, sehingga memicu terjadinya cuaca ekstrem dikarenakan merupakan tempat bertemunya angin tropis yang mengakibatkan angin topan. Daerah konvergensi biasanya disebut juga daerah angin mati. Daerah konvergensi ini memanjang dari pesisir barat Sumatera Barat hingga Bengkulu-Lampung, dari Banten hingga Jawa Tengah serta Jawa Timur, dari Bali hingga Nusa Tenggara, dari Kalimantan Timur hingga Sulawesi bagian utara, dan berhenti pada

daerah Sulawesi Tenggara. Angin pada daerah konvergensi ini bergerak sangat kuat hingga kecepatan 25 knot.

Hal ini menyebabkan terjadinya angin kencang termasuk pada beberapa daerah di Jawa Timur, khususnya Kabupaten Bondowoso. Angin kencang merujuk pada suatu kejadian hidrometeorologi yang selalu bertambah intensitas nya dari waktu ke waktu dan umumnya terjadi pada saat peralihan musim dari panas ke musim hujan. Angin ini berbentuk pusaran angin dengan kecepatan 74 mph (120 km/jam). Menurut data dari Peta Indeks Resiko Bencana Cuaca Ekstrem Indonesia Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh BNPB menyatakan bahwa Kabupaten Bondowoso berada pada urutan ke 390 dari 510 kabupaten/kota dan urutan ke 19 dari 38 kabupaten/kota se – Jawa Timur dalam kategori kabupaten/kota rawan bencana cuaca ekstrem. Cuaca ekstrem yang terjadi di Bondowoso mengakibatkan beberapa bencana, termasuk angin kencang. Angin adalah aliran udara dalam jumlah besar yang disebabkan oleh adanya perbedaan tekanan udara di sekitarnya. Angin yang terjadi pada saat cuaca ekstrem merujuk pada angin kencang bertekanan udara tinggi yang dapat menggerakkan massa yang juga (pada kasus tertentu) dapat mengakibatkan kerusakan yang cukup parah.

Berdasarkan data indeks risiko bencana yang telah disebutkan diatas, Kabupaten Bondowoso yang berada pada urutan ke-390 dari 510 kabupaten/kota di Indonesia rawan bencana cuaca ekstrem ini menyebabkan Kabupaten Bondowoso sering kali dilanda bencana angin kencang setiap tahunnya. Dalam tanggung jawabnya tersebut pemerintah juga telah memfasilitasi penanganan bencana melalui pembentukan kelembagaan khusus yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang mana lembaga ini bertugas seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Pasal 4, yaitu menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara. Lembaga ini merupakan lembaga khusus yang didukung dengan sumber daya serta kewenangan yang memadai dalam urusan penanggulangan bencana.

Banyaknya bencana yang terjadi dengan kerusakan yang semakin meningkat setiap tahun meskipun telah diberikan berbagai macam sumber daya yang melimpah dan kewenangan serta kelembagaan memadai yang bertugas menanggulangi kebencanaan kepada daerah, menunjukkan bahwa terdapat persoalan yang terjadi. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menelaah masalah ini, mengingat pada era desentralisasi, pemerintah daerah telah memiliki wewenang yang cukup besar terhadap daerahnya termasuk kewenangan menyelenggarakan urusan penanggulangan bencana daerah, bahwa setiap kewenangan pasti disertai dengan anggaran serta sumber daya aparatur yang memadai. Oleh sebab itu, kerusakan yang terus meningkat ini menunjukkan bahwasanya terdapat persoalan dari responsivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan

menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui respon dan daya tanggap BPBD terhadap dampak bencana daerah di Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kerusakan yang diakibatkan oleh bencana angin kencang semakin meningkat setiap tahunnya, seperti halnya kejadian di tahun 2017 yang mengakibatkan total 169-unit rumah mengalami kerusakan dan kejadian di tahun 2022 yang mengakibatkan 272-unit rumah mengalami kerusakan. Di samping kerusakan unit rumah, terdapat pula total kerugian yang mana total kerugian paling rendah ialah sebanyak 47 juta di tahun 2018 dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga di tahun 2022 menyentuh total kerugian 2 miliar 452 juta dengan total 272-unit rumah mengalami kerusakan. Meningkatnya jumlah kerusakan yang ditimbulkan serta total kerugian yang telah terhitung akibat bencana angin kencang ini dapat menjadi salah satu bentuk parameter keterlambatan pemerintah dalam hal penanggulangan bencana angin kencang. Padahal, peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam memberikan upaya penanggulangan bencana angin kencang dengan respon yang cepat dan tepat. Hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab pemerintah yaitu menjaga keamanan serta keselamatan rakyatnya serta menjaga kesejahteraan di berbagai bidang dan menjamin kehidupan warga masyarakatnya, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 mengenai pokok penting penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mana hal tersebut merupakan adalah tanggung jawab dan wewenang dari Pemerintah dan pemerintah daerah, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh yang mana penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan pada tahap pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Desvita Anggraini Wulandari dan Is Hadri Utomo (2021) menunjukkan Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar dalam upaya menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi ini sudah cukup baik atau telah responsif. Penelitian yang dilaksanakan oleh Rusni Djafar dan Umar Sune (2022) menunjukkan Indikator kemampuan merespon keluhan pasien Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato masih relatif kurang baik. Penelitian yang dilaksanakan oleh Sigit Hardiyanto dan Darmansyah Pulungan (2019) menunjukkan Komunikasi yang dilakukan oleh BPBD Kota Padangsidim pun dalam meminimalisir korban jiwa atas peristiwa bencana alam telah berlangsung secara efektif, sederhana, pendek dan langsung. Penelitian yang dilaksanakan oleh Sri Heryati (2020) menunjukkan Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan apa saja peran pemerintah daerah dalam hal penanggulangan bencana yang mana hal tersebut diselenggarakan oleh BPBD. Penelitian yang dilaksanakan oleh Hani Syarifah dan Diane Tanti Poli (2020) menunjukkan Kapabilitas Penanggulang an bencana yang

dilakukan BPBD Kota Balikpapan tergolong baik. Penelitian yang dilaksanakan oleh Khairunnisa Adri dan Hayatul Khairul Rahmat (2020) menunjukkan Analisis Penanggulangan Bencana Alam dan Natech Guna Membangun Ketangguhan Bencana dan Masyarakat Berkelanjutan di Jepang. Penelitian yang dilaksanakan oleh Ariyanto, D. (2018) menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi dalam meningkatkan efektivitas BPBD adalah: perbedaan cara, sikap kerja, tupoksi, komitmen, prosedur, pembiayaan, persediaan prasarana dan sarana penunjang, serta kemampuan/skill. Hambatan yang ditemui dalam koordinasi untuk meningkatkan efektivitas BPBD adalah kurangnya komunikasi dan intensitas pertemuan, masih adanya sikap egosektoral dan kemampuan pelaksana dalam manajemen penanggulangan bencana. Penelitian yang dilaksanakan oleh Iqbal, M., Rahiem, V. A., Fitrananda, C. A., & Yusuf, Y. M. (2021) menunjukkan komunikasi mitigasi bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat (BPBD Jabar) belum dilakukan secara maksimal karena tidak menjadi prioritas utama sehingga tidak memiliki pola yang jelas dalam komunikasi mitigasi bencana. Meskipun demikian, BPBD Jabar telah mengadakan program mitigasi seperti Sosialisasi daerah rawan bencana Pelatihan tanggap bencana Pemasangan Peta Jalan dan Tanda Evakuasi yang dibantu oleh masyarakat/sukarelawan bencana. Membuat media edukasi untuk anak sekolah (video animasi). Membentuk desa tangguh bencana. Program-program ini belum dilakukan secara intensif ditambah lagi BPBD Jabar sendiri tidak memiliki tim komunikasi mitigasi bencana yang fokus memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai risiko bencana gempa akibat sesar Lembang. Penelitian yang dilaksanakan oleh Wijanarko, R. (2022) menunjukkan Hasil dari penyaluran bantuan logistik, bahwa program ini telah terlaksana cukup efektif, tetapi masih terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu mengenai, sumber daya manusia yang masih kurang, mekanisme penyaluran yang panjang, dan kurangnya anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurang efektifnya penyaluran bantuan logistik di Kota Tanjungpinang. Penelitian yang dilaksanakan oleh Pangemanan, S. E., & Monintja, D. K. (2023) menunjukkan Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Manado Pada Tahap Tanggap Darurat Banjir sudah cukup baik, dengan melihat data-data kejadian bencana serta korban bencana banjir, mulai dari data kejadian bencana tahun 2019-2022 terus berkurang dan sedikit menelan korban jiwa. Penelitian yang dilaksanakan oleh NR, T. D., & Pinuji, P. (2023) menunjukkan setiap bencana memiliki upaya mitigasi yang berbeda pula, seperti banjir yang perlu diadakannya larang pembuatan pemukiman di aliran sungai. Puting beliung yang mengharuskan menyusun peta rawan bencana puting beliung, tsunami dengan cara memasang alat pendeteksi bencana di daerah pantai. Serta bencana tanah longsor mitigasinya dengan cara pelarangan penggundulan hutan. Upaya mitigasi ini harus dilakukan oleh semua kalangan masyarakat di seluruh negeri.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni responsivitas BPBD dalam menanggulangi dampak bencana angin kencang yang terjadi di Kabupaten Bondowoso.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis serta mendeskripsikan responsivitas BPBD dalam menanggulangi dampak bencana angin kencang yang terjadi di Kabupaten Bondowoso.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini membahas tentang responsivitas BPBD dalam menanggulangi dampak bencana angin kencang yang terjadi di Kabupaten Bondowoso.

3.1. Responsivitas BPBD dalam menanggulangi dampak bencana angin kencang yang terjadi di Kabupaten Bondowoso

Sebagai Pilar utama dalam hal penanganan dan pencegahan bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai fungsi koordinasi yang mana BPBD diharuskan memiliki daya tanggap yang cepat dan sangat responsif dalam hal penanganan maupun penanggulangan bencana yang belum, sedang dan telah terjadi. Laporan-laporan bencana yang datang harus di respons oleh pihak BPBD hal tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari tugas dan fungsinya sebagai Pilar utama dalam hal penanganan bencana yang terjadi di daerah Kabupaten Bondowoso (Yuyun,2019).

Maksud dari dimensi merespon laporan masyarakat dalam responsivitas badan penanggulangan bencana daerah dalam penanggulangan bencana angin kencang di kabupaten bondowoso provinsi jawa timur ialah mengetahui sejauh mana kemampuan merespon dari Operator Pusdalops dalam merespon laporan bencana angin kencang yang masuk. Dalam mengkaji Dimensi Merespon Masyarakat terdapat salah satu indikator yang dapat menentukan bahwasannya Dimensi Merespon Laporan Masyarakat ini sudah berjalan dengan baik ialah dengan melihat indikator Kemampuan petugas dalam merespon pelaporan dari Masyarakat. Indikator yang disebutkan bisa dilihat dari beberapa hal yaitu dengan kegiatan yang BPBD adakan untuk mendukung kemudahan dalam melaporkan kejadian bencana angin kencang, penting untuk memperhatikan sejauh mana BPBD Merespon kebutuhan dan aspirasi Masyarakat terkait bencana tersebut (Naufal,2020). Terdapat beberapa akses yang diberikan oleh BPBD untuk mempermudah warga dalam melakukan pelaporan bencana angin kencang tanpa perlu datang ke kantor Masyarakat sudah bisa mengakses media tersebut untuk melaporkan kejadian bencana angin kencang yang sedang terjadi beberapa media tersebut ialah call center 122, grup whatsapp, dan aplikasi SIGABAN ucap Operator

Pusdalops saat dilakukan wawancara terkait apa saja media yang diberikan BPBD kepada masyarakat untuk perihal pelaporan bencana angin kencang.

Maksud dari dimensi kecepatan pelayanan dalam responsivitas BPBD dalam penanggulangan bencana angin kencang di kabupaten bondowoso provinsi jawa timur ialah adalah sejauh mana BPBD dapat memberikan layanan dengan cepat dan efisien kepada masyarakat yang terdampak bencana. Pada dimensi kecepatan pelayanan ini yang menjadi indikator dari dimensi ini ialah Kesigapan dari Tim Respon Cepat dalam merespon bencana angin kencang yang masuk pada laporan bencana. Pada Standar Operasional Prosedur Penanggulangan Bencana Angin Kencang terdapat rentang waktu penanganan yang sudah ditetapkan dalam SOP tersebut untuk pihak BPBD melakukan penanggulangan maupun penanganan dalam kejadian bencana angin kencang saat pertama kali operator menerima laporan dan langsung diverifikasi tentang kebenaran laporan tersebut Saat setelah operator memutuskan bahwa laporan tersebut benar, Tim Respons Cepat-Penanggulangan Bencana BPBD Kabupaten Bondowoso langsung menuju tempat kejadian dengan waktu yang telah ditetapkan yaitu 10 menit. Sistem piket yang ada dalam BPBD Kabupaten Bondowoso berjalan dengan baik yang mana piket akan terus berjaga dalam kurun waktu 24 jam dan selalu siap dalam merespons semua laporan yang ada, hal tersebut membuktikan bahwa BPBD Kabupaten Bondowoso memiliki daya tanggap tinggi dalam merespons laporan. Tidak hanya kesigapan dari Tim Respon Cepat saja yang dilihat akan tetapi kesigapan dalam menerima laporan oleh operator pusdalops juga dibutuhkan dalam mempercepat penanganan bencana angin kencang tersebut hal ini juga didapat dari hasil wawancara dengan operator pusdalops yang mana informan menjelaskan bahwa laporan yang diterima secara otomatis akan diverifikasi oleh tim. Jika laporan tersebut valid, tim akan menanganinya dengan cepat. Tim juga akan segera menuju lokasi kejadian untuk mengecek kondisi di lapangan dan menetapkan apakah kerusakan tersebut ringan, sedang, atau berat. Meskipun jarak tempuh seringkali menjadi kendala, tim bersiap memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Sebelum menentukan dampak bencana itu ringan, sedang, atau berat tim akan melakukan pendataan awal agar dapat melihat detail kerusakan secara langsung di lokasi kejadian.

Fokus dari Dimensi Ketepatan Pelayanan dalam Responsivitas BPBD dalam penanggulangan bencana angin kencang ialah bagaimana BPBD bertindak dalam menanggapi laporan yang masuk apakah telah sesuai dengan SOP penanganan dampak bencana angin kencang yang terjadi. Dalam Dimensi Ketepatan Pelayanan bencana angin kencang yang menjadi indikator keberhasilan dimensi tersebut ialah Bagaimana tindak lanjut dari BPBD dalam laporan kejadian bencana angin kencang yang masuk (Koenti,2016). Dokumentasi juga merupakan bukti bahwa Tim Respons Cepat melakukan penanganan dampak bencana angin kencang dengan tepat. Dengan dibuatnya Dokumentasi kegiatan tersebut bisa dilihat bahwa Tim BPBD telah sesuai memberikan penanganan atas bencana yang terjadi, seperti saat kejadian pohon tumbang di sore hari dan cuaca masih hujan dengan alat gergaji mesin Tim Respons Cepat tetap melakukan pemotongan agar arus lalu lintas yang terganggu cepat Kembali normal begitulah hasil wawancara tersebut. Tidak hanya pada fase penanganan saja, Ketua Tim Respon Cepat setelah di wawancarai juga menambahkan bahwa dokumentasi pemberian bantuan pada korban terdampak bencana angin kencang juga dilakukan untuk mendukung ketepatan tim dalam hal penanggulangan pasca bencana yang mana

untuk pemberian bantuan disesuaikan dengan tingkat kerusakannya. Pemberian bantuan tersebut merupakan suatu Upaya BPBD Kabupaten Bondowoso dalam merespons korban bencana angin kencang di lingkungan Kabupaten Bondowoso dengan tepat.

Kecermatan pelayanan dalam hal responsivitas BPBD berfokus pada bagaimana operator Pusat Komando Pengendalian Operasi (Pusdalops) menerima laporan yang masuk dan melakukan verifikasi terkait laporan bencana angin kencang yang diterima. Operator Pusdalops harus memastikan bahwa setiap laporan yang diterima diproses dengan teliti dan cermat, termasuk melakukan verifikasi terhadap kebenaran informasi yang disampaikan. Untuk melihat sejauh mana Dimensi Kecermatan Pelayanan pada responsivitas penanggulangan bencana angin kencang pada BPBD bisa dilihat dari indikator Kecermatan petugas dalam menanggapi laporan kejadian bencana tersebut. Dari banyaknya kejadian bencana angin kencang yang dilaporkan kepada Pihak BPBD Kabupaten Bondowoso di samping terdapat laporan yang valid setelah diverifikasi terdapat juga laporan yang fiktif dan untuk jumlahnya tidak sedikit juga hal tersebut didapat dari wawancara bersama Operator pusdalops setelah peneliti menanyakan apakah ada laporan fiktif yang masuk terkait bencana angin kencang. Dengan melihat beberapa indikator, seperti pantauan radar dari BMKG Juanda yang menunjukkan warna merah untuk hujan badai, BPBD dapat memperkirakan kemungkinan laporan bencana angin kencang yang masuk melalui Aplikasi SIGABAN atau Grup Whatsapp. Biasanya, laporan tersebut berupa dokumentasi seperti rusaknya rumah atau tumbangnya pohon. Setelah menerima laporan, BPBD tidak langsung mengirimkan tim untuk terjun. Mereka akan memverifikasi dengan menghubungi perangkat desa terkait atau relawan yang berada di daerah tersebut untuk memastikan kebenaran laporan. Setelah itu, BPBD akan melaporkan kembali kepada pelapor dan memeriksa foto dokumentasi yang telah dikirimkan. Hal tersebut didapatkan saat peneliti mewawancarai operator pusdalops mengenai langkah apa yang dilakukan setelah mendapatkan laporan masuk terkait bencana angin kencang Menurut Informan yang menjabat sebagai Ketua Tim Respons Cepat, dalam konteks penanganan laporan bencana angin kencang, operator tidak akan menginstruksikan tim untuk turun menangani jika laporan yang diterima dianggap tidak terlalu mendesak atau dapat diselesaikan oleh perangkat desa atau masyarakat setempat.

Maksud dari dimensi waktu pelayanan pada responsivitas BPBD dalam menanggulangi bencana angin kencang adalah sejauh mana BPBD mampu memberikan layanan yang cepat dan efisien kepada masyarakat yang terdampak bencana tersebut. Pada dimensi Waktu Pelayanan yang menjadi indikator dari dimensi tersebut ialah ketepatan waktu tanggap dalam menanggapi laporan kejadian bencana angin kencang yang masuk. BPBD Kabupaten Bondowoso menetapkan waktu yang diperlukan oleh tim untuk merespons laporan bencana angin kencang yang telah diterima yaitu selama kurang lebih 10 menit. Menurut Ketua Tim Respon Cepat terdapat penghitungan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Bondowoso untuk bisa menilai capaian tiap tahunnya tentang ketepatan waktu pelayanan bencana angin kencang yang dilakukan dengan analisis data perhitungan pada tiap kejadian dengan melihat waktu respons bencana angin kencang apakah sesuai dengan ketetapan waktu Melalui penghitungan tersebut, BPBD Kabupaten Bondowoso dapat menganalisis ketepatan waktu respons penanganan bencana angin kencang setiap tahunnya. Kabupaten Bondowoso selalu merespons bencana angin kencang dengan cepat dan tepat, terbukti dari tingkat capaian mereka dalam memenuhi waktu tanggap penanganan yang selalu lebih tinggi dibandingkan dengan waktu tidak terpenuhi di setiap tahunnya. Capaian ini didukung oleh

kecepatan penanganan dari Tim BPBD itu sendiri serta berbagai akses pelaporan yang tersedia, seperti call center, WhatsApp, dan aplikasi SIGABAN. Meskipun menurut wawancara dengan operator Pusdalops, WhatsApp dianggap lebih praktis dan efisien dalam pelaporan karena memungkinkan komunikasi interaktif dua arah dengan pelapor. Aplikasi SIGABAN dianggap kurang efisien dan meningkatkan risiko penerimaan laporan palsu karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Bondowoso. Setelah menerima laporan, operator Pusdalops melakukan verifikasi dengan meminta dokumentasi kejadian dan lokasi dari pelapor untuk mengurangi kemungkinan laporan palsu. Kemudian, untuk menunjang ketanggapan dan kecepatan respons laporan bencana angin kencang, BPBD Kabupaten Bondowoso menerapkan tiga piket jaga Operator Pusdalops. Setiap piket telah ditentukan dengan jadwal tertentu, dimana satu orang berjaga pada pagi hingga siang, satu orang pada siang hingga sore, dan satu orang pada sore hingga malam. Hal ini didasarkan pada pengalaman bahwa bencana angin kencang sering terjadi pada sore bahkan malam hari. Selama piket, operator Pusdalops terus memantau kondisi cuaca di Kabupaten Bondowoso dan sekitarnya melalui BMKG Juanda Pantauan Citra Radar. Laporan peringatan dini terkait cuaca ekstrem tersebut akan disampaikan oleh operator Pusdalops melalui grupgrup WhatsApp kepada berbagai relawan dan tim respons cepat. Setelah informasi tersebar, relawan dan perangkat desa akan menghubungi pihak BPBD untuk melaporkan apabila ada kejadian bencana angin kencang. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Bencana BPBD Kabupaten Bondowoso selalu menekankan pentingnya sosialisasi kepada perangkat daerah tentang pelaporan kejadian bencana dengan output yang jelas dan baik. Tim BPBD Kabupaten Bondowoso dituntut untuk selalu responsif dalam menanggapi laporan tersebut, sementara perangkat desa diharapkan untuk aktif melaporkan kejadian bencana angin kencang melalui Grup WhatsApp BPBD Kabupaten Bondowoso atau beberapa nomor dari Tim Respons Cepat.

Fokus utama dari dimensi ini adalah kemampuan BPBD dalam mendengarkan keluhan atau laporan yang disampaikan oleh masyarakat, melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap laporan tersebut, serta mengambil tindakan yang sesuai untuk menanggapi keluhan atau laporan tersebut. Dalam konteks ini, penting bagi BPBD untuk memiliki prosedur yang jelas dan efektif dalam menanggapi keluhan atau laporan masyarakat, serta memiliki mekanisme komunikasi yang baik untuk memberikan feedback kepada masyarakat terkait tindakan yang diambil sebagai respons terhadap keluhan atau laporan tersebut. Dengan demikian, dimensi ini membantu memastikan bahwa BPBD dapat memberikan layanan yang berkualitas dan responsif kepada masyarakat dalam situasi darurat seperti bencana angin kencang. Pada dimensi kemampuan menanggapi keluhan ini indikator yang sesuai dalam menentukan keberhasilan Tim BPBD dalam Menanggapi laporan bencana angin kencang yang masuk ialah tingkat kepuasan pelayanan pelaporan bencana angin kencang.

3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh Natsya (2023) dengan rutinnya BPBD Kabupaten Bondowoso dalam menyelenggarakan Sosialisasi mengenai mitigasi bencana angin kencang setiap 2,5 bulan membuat para Masyarakat jadi jauh lebih mengerti bagaimana harus bertindak saat terjadi bencana angin kencang tersebut ditambah juga respons yang cepat dan tanggap terhadap setiap pelaporan bencana angin kencana dari masyarakat menjadi landasan penting dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan public. Ketersediaan petugas yang siaga dan Upaya promosi

partisipasi masyarakat melalui berbagai media telah meningkatkan efektivitas BPBD dalam merespons laporan dari Masyarakat secara efektif dan tepat waktu. Secara keseluruhan, temuan ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara instansi dan Masyarakat dalam meminimalkan potensi risiko bencana angin kencang serta meningkatkan perlindungan Masyarakat secara keseluruhan mengenai dampak bencana angin kencang yang akan terjadi serta meningkatkan kesadaran Masyarakat tentang pentingnya melakukan pelaporan kepada pihak BPBD. Kecepatan dalam pelayanan merupakan salah satu faktor penting yang sangat berpengaruh dalam menjaga tingkat kepuasan pelayanan, seperti halnya kecepatan dalam pelayanan laporan kejadian bencana angin kencang oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Masyarakat membutuhkan respon yang cepat agar situasi lingkungan tetap kondusif dan merasa yakin dengan kinerja BPBD sebagai garda terdepan dalam penanganan bencana. Namun, terdapat beberapa hambatan dalam penerapan kecepatan ini. Salah satunya adalah keterlambatan mobilitas tim BPBD menuju lokasi kejadian, yang disebabkan oleh jarak yang jauh dan kurangnya posko siaga pada titik-titik strategis rawan bencana. Hal tersebut dapat menghambat penanganan bencana angin kencang terutama di daerah yang jauh dari pusat kota atau kantor BPBD. Meskipun BPBD telah menetapkan target waktu 10 menit dari menerima laporan hingga tim reaksi cepat tiba di lokasi, akan tetapi dalam kenyataannya waktu tersebut belum tentu cukup. Faktor-faktor seperti jarak tempuh yang jauh dari posko siaga dan kondisi cuaca saat proses penanganan dampak angin kencang seperti hujan badai dapat mempengaruhi kecepatan dan efektivitas penanganan. Oleh karena itu, diperlukan pembuatan posko siaga tambahan di wilayah tersebut untuk mempercepat mobilitas dan pelayanan penanganan bencana angin kencang. Selain itu, tambahan personil relawan juga diperlukan agar siap digunakan dalam situasi darurat dan mempercepat penanganan dampak bencana angin kencang.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan hasil analisis dari data penelitian yang didapat peneliti tentang responsivitas badan penanggulangan bencana daerah dalam penanggulangan bencana angin kencang di Kabupaten Bondowoso provinsi Jawa Timur peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Responsivitas BPBD dalam penanggulangan bencana angin kencang di Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur yang dilihat dari beberapa indikator yaitu Dimensi Kemampuan Merespons Laporan Masyarakat, Dimensi Kecepatan Pelayanan, Dimensi Ketepatan Melayani, Dimensi Kecermatan Melayani, Dimensi Ketepatan Waktu Pelayanan, dan juga Dimensi Menanggapi Keluhan yang sudah dilakukan oleh BPBD Kabupaten Bondowoso dengan baik. Responsivitas yang diberikan oleh BPBD Kabupaten Bondowoso juga sudah sangat baik dilihat dari penilaian survey yang sudah diberikan oleh masyarakat terkait bagaimana pelayanan dan penanganan pelaporan bencana angin kencang yang terjadi di Kabupaten Bondowoso.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal waktu dikarenakan proses penelitian hanya berlangsung 2 (dua) minggu.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*): Peneliti menyadari masih terbatasnya temuan yang peneliti temukan, oleh karena itu agar dapat dilakukan penelitian lanjutan di lokasi serupa untuk menambah rekomendasi dan mengatasi permasalahan yang ada serta mencegah permasalahan baru yang dikhawatirkan akan muncul.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bondowoso beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adri, K., Rahmat, H. K., Ramadhani, R. M., Najib, A., & Priambodo, A. (2020). Analisis Penanggulangan Bencana Alam dan Natech Guna Membangun Ketangguhan Bencana dan Masyarakat Berkelanjutan di Jepang. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 361-374.
- Ariyanto, D. (2018). Koordinasi kelembagaan dalam meningkatkan efektivitas badan penanggulangan bencana daerah. *Journal of management Review*, 2(1), 161-171.
- Djafar, R., & Sune, U. (2022). Responsivitas Pelayanan Publik (Studi Kasus Pelayanan Pasien BPJS Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato. *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 14(1), 99-112.
- Hardiyanto, S., & Pulungan, D. (2019). Komunikasi Efektif Sebagai Upaya Penanggulangan Bencana Alam di Kota Padangsidimpuan. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(1), 30-39.
- Heryati, S. (2020). Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)*, 139-146.
- Iqbal, M., Rahiem, V. A., Fitrananda, C. A., & Yusuf, Y. M. (2021). Komunikasi Mitigasi bencana (studi kasus mitigasi Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jabar dalam Menghadapi bencana alam gempa bumi akibat sesar Lembang). *Linimasa: jurnal ilmu komunikasi*, 4(2), 186-194.
- Koenti, I. J. (2016). Diskresi dalam Penanggulangan Bencana di DIY dengan Paradigma Kontinjensi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23(3), 461-485.
- Natsya, I. (2023). Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mengurangi Risiko Banjir Di Aceh Tamiang (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan).
- Naufal, A. (2020). Pendidikan Kepedulian Sosial Pada Kegiatan Relawan Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 (Bachelor's thesis, Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- NR, T. D., & Pinuji, P. (2023). Mitigasi Bencana Pada Bencana Hidrometeorologi Di Indonesia. In *Proceeding Science and Engineering National Seminar (Vol. 8, No. 1, pp. 144-148)*.
- Pangemanan, S. E., & Monintja, D. K. (2023). Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pada Tahap Tanggap Darurat Banjir Di Kota Manado. *GOVERNANCE*, 3(1).

Syarifah, H., Poli, D. T., Ali, M., Rahmat, H. K., & Widana, I. D. K. K. (2020). Kapabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 398-407.

Yuyun, S. (2019). Sistem Informasi Pada Pemadam Kebakaran Untuk Menunjang Kualitas Pelayanan Di Kantor Uptd Pemadam Kebakaran Kabupaten Polewali Mandar. *MITZAL (Demokrasi, Komunikasi dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi*, 4(1).

Wijanarko, R. (2022). Efektivitas Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penyaluran Bantuan Logistik Pada Korban Bencana Banjir Di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).

Wulandari, D. A., & Utomo, I. H. (2021). Responsivitas Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar dalam Upaya Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Karanganyar. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 1(1), 117-127.

